

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-Hasil Peneliti Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan maka beberapa peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadi refensi bagi penulis yaitu sebagai berikut :

Pertama, Ratno (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Karisidenan Surakarta 2009-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi dinamis *autoregressive distributed-lag* dengan asumsi pertumbuhan ekonomi suatu individu pada tahun tersebut dipengaruhi oleh belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun tersebut, belanja langsung dan belanja tidak langsung satu tahun sebelumnya, langsung dan belanja tidak langsung dua tahun sebelumnya dan juga pertumbuhan ekonomi satu tahun sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung satu tahun sebelumnya, serta pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dikawasan Solo Raya. Belanja langsung dan belanja tidak langsung satu tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini, sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa belanja langsung lebih berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Maga, *et al* (2016) Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Sorong Selatan. Pengeluaran pemerintah adalah dapat bersifat "*exhaustive*" yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Disamping itu pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat "*transfer*" saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan kepada subsidi atau mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (*grants*). Jadi "*exhaustive*

*expenditure*” menghasilkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Sedangkan “*transfer payments*” hanya mengeser tenaga pembeli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan dari penggunaan tersebut. Pada penelitiannya bertujuan untuk seberapa besar pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian Kabupaten Sorong Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan asset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda. Hasil analisis diketahui bahwa secara parsial atau bersama-sama belanja langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian kabupaten Sorong Selatan dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian secara simultan kedua variabel secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sorong Selatan.

Ketiga, Ratnadi *et al* (2016) Analisis Pengaruh Belanja Langsung Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengaruh belanja langsung, pertumbuhan ekonomi pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Yang dimana, mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa unit kerja terkait terlebih dahulu harus mengelompokkan belanja menjadi langsung dan tak langsung. Belanja langsung umumnya berkaitan dengan investasi pemerintah yang berimplikasi langsung pada kepentingan rakyat. Penelitian dilakukan di sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang dikutip dari laporan tahunan. Sampel penelitian berjumlah 45 amatan dari tahun 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi dua tahap (*two stage least square*). Untuk menegaskan hasil penelitian dilakukan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan dan belanja langsung berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Dengan Demikian,

semakin tinggi alokasi belanja langsung pada APBD menyebabkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi atau mengentaskan tingkat kemiskinan.

Keempat, Novandy, *et al* (2019) Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah). Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja langsung dan surplus anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Untuk mendefinisikan dan menganalisis pengaruh pengeluaran langsung terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Mendefinisikan dan menganalisis pengaruh surplus anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini melibatkan sepuluh kabupaten dan satu kota yang dipilih secara *purposive*. Jenis penelitian adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengeluaran langsung dan surplus anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan R square sebesar 0,2840 atau 28,4% berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai taraf 2,797 pada tingkat signifikan dari 0,008;
2. Surplus anggaran secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai sebesar 0,927 pada tingkat signifikan 0,359.

Kelima, Putra (2017) Analisis Pengaruh Belanja Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014). Dalam penelitiannya menyatakan Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat hasil dari kinerja pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diprosikan oleh PDRB yang dimana dengan peningkatan pembangunan ekonomi daerah akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah. Faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan investasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja daerah, SiLPA, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah dan investasi berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan searah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan SiLPA tidak berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang tidak searah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi studi kasus dalam penelitian kali ini.

Keenam, Chamdani (2019) Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tangerang Tahun 2008–2014. Dalam penelitiannya mengutarakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Alokasi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan daerah melalui prioritas anggaran dan pelayanan publik guna memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausal empiris belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2014. Berdasarkan hasil uji T dan Uji F secara parsial bahwa tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Tidak cukup bukti terdapat pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Kemudian secara bersama-sama terbukti terdapat pengaruh simultan dan signifikan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Pengaruh langsung belanja langsung terhadap belanja tidak langsung sebesar 94,9%. Pengaruh langsung belanja langsung terhadap PDRB sebesar 0,35% dan pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap PDRB sebesar 63,5% kemudian secara bersama-sama belanja langsung dan belanja

tidak langsung memberikan pengaruh simultan dan signifikan terhadap PDRB sebesar 89,9% dan sisanya 10,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk mencapai nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 0 pemerintah Kabupaten Tangerang harus menutup defisit nilai konstan sebesar Rp 132,7 Miliar sehingga nilai konstan menjadi positif. Kemudian untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1 digit dibutuhkan alokasi belanja daerah senilai Rp 6,1 Miliar.

Ketujuh, Rudibdo (2019) Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Ekskarsidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran langsung, belanja tidak langsung, investasi non pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Karesidenan Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder time series selama periode 8 tahun (2008-2015). Data dianalisis dengan menggunakan Software Eviews 8.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran langsung dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja tidak langsung dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedelapan, Tuasela (2019) Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Penelitian menggunakan komparatif metode kausal, yang dimaksudkan untuk mengukur efek atau menyelidiki pengaruh variabel independen (belanja daerah) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara teknik, studi pustaka dan dokumentasi. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika, sederhana alat analisis regresi linier dipakai. Hasilnya menunjukkan bahwa ada tidak ada korelasi yang signifikan antara belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis korelasi *Bivariat Person* menunjukkan nilai r-hitung (0,371) < nilai r-tabel (0,632) maka  $H_0$  diterima, artinya bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara

belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Mimika, apalagi dalam aspek belanja daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika secara signifikan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan (*growth*) adalah suatu proses untuk meningkatkan produksi (*output*) yang merupakan kegiatan rutin. Menurut *Schumpeter*, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkup masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Yang paling cocok untuk itu ialah lingkungan masyarakat yang menganut *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial atau komunis yang cenderung mematikan kreativitas orang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada

usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006:423).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian (Samuelson, 2004). Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk.

Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Harga yang berubah merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan ahli ekonomi ketika mereka menggunakan uang sebagai tolak ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur nilai uang dari barang dan jasa adalah menggunakan harga pasar untuk barang dan jasa yang berbeda (Samuelson, 2004).

Menurut Todaro dan Smith (2004) terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Faktor penentu penting pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Modebe, et al. (2012) menyatakan pengeluaran pemerintah berulang memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Pertumbuhan ekonomi tergantung pada ukuran, kapasitas belanja, dan efektif menggunakan belanja modal di proses pembangunan (Sharma, 2012). Felix (2012) berpendapat bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin yang relatif kurang produktif. Peningkatan anggaran

modal akan menyebabkan peningkatan belanja modal pada infrastruktur. Solikin (2007) menyatakan belum terorientasinya pengelolaan belanja modal pada publik menyebabkan alokasi belanja modal tidak terlaksana sepenuhnya bagi pemenuhan kesejahteraan publik.

### **2.2.2 Belanja Langsung**

Untuk pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **2.2.2.1 Klasifikasi Belanja**

Menurut PP No 24 tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah dibagi :

##### **1. Klasifikasi Belanja menurut Fungsi.**

Belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

## 2. Klasifikasi Belanja menurut Urusan Pemerintah.

Klasifikasi Belanja Urusan Pemerintah terdiri dari belanja wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pemilihan terdiri dari bidang pertanian, kebutuhan energi dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

## 3. Klasifikasi Belanja menurut Organisasi.

Klasifikasi Belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit pengelolaan anggaran. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

### **2.2.2.2 Jenis-Jenis Belanja Langsung**

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 50 Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa; dan
- c. Belanja modal.

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas didalam maupun diluar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pasal 51 menjelaskan Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pada Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa :

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Pada Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2, Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

3. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Wewenang masing-masing SKPD untuk menganggarkan belanja langsung dalam RKA-SKPD dijelaskan pada pasal 54, yaitu belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

### **2.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA**

SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Bentuk penggunaan SiLPA adalah untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah. Dalam Pasal 161 terdapat penjelasan :

1. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 1 huruf c dapat berupa :
  - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat 2;
  - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138;
  - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
3. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
4. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
5. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

### 2.2.4 Pengembangan Hipotesis

Berikut ini kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini :

H1 : Belanja Langsung berpengaruh Signifikan Pertumbuhan Ekonomi

H2 : Sisa Lebih (SiLPA) berpengaruh Signifikan Pertumbuhan Ekonomi.

### 2.2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model penelitian yang digunakan :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

